



**RENJA  
2023**



# **RENCANA KERJA TAHUN 2023**

**BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK**

**KABUPATEN BALANGAN**

Alamat:

Jln. Jendral Ahmad Yani Km. 2,5 Paringin Selatan Kode Pos 71618

Telp/Fax (0526) 2028203

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat diselesaikannya Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2022. Rencana Kerja ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh setiap SKPD sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan merupakan bagian dari tahapan upaya pencapaian Rencana Kerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 202#.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta memudahkan dalam melakukan evaluasi kinerja SKPD.

Semoga penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2022 dapat bermanfaat dan dapat mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Balangan.

Parangin, 15 Juli 2022

Plt. Kepala Badan  
Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Balangan



**RUDIANSYAH SOFYAN, S. Hut, ME**  
Pembina Utama Muda/ IVc  
NIP.19690324 199703 1 001

# DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB II. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	35
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Dan Sinergitas Kebijakan Daerah.....	37
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	42
3.3. Program dan Kegiatan .....	45
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesbangpol Tahun 2022..	53
<b>BAB V. PENUTUP</b>	60
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2023 disusun mengacu pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Balangan untuk periode tahun 2023. Perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2023 dirumuskan dengan menelaah hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dan mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Rencana Kerja ini sangat penting bagi SKPD sebagai dasar untuk penyusunan anggaran dan kegiatan pada tahun 2023 sebagai proses tahapan penyusunan rancangan APBD Kabupaten Balangan Tahun 2023.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 -2026
15. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
16. Peraturan Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan
17. Peraturan Bupati Balangan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2023 dimaksudkan sebagai media evaluasi pelaksanaan program/kegiatan, merumuskan rencana kerja untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya.

#### **b. Tujuan**

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Tahun 2023 ini adalah untuk memudahkan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan agar dalam kinerjanya tidak lepas dari indikator dan target yang sudah ditentukan, agar setiap pejabat dan pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dapat dicapai secara optimal.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

## BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

## BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

## BAB V. PENUTUP

### LAMPIRAN-LAMPIRAN



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2022 yang didasarkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026, untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam rangka memenuhi target sasaran RPJMD arah kebijakan yang dilaksanakan adalah peningkatan kualitas data dan informasi serta memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui program pengembangan data informasi/statistik daerah dan program perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas. Adanya data/informasi, menjadikan perencanaan yang dibuat menjadi terukur. Untuk mewujudkan peningkatan kinerja pembangunan daerah dilaksanakan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang baik yang senantiasa dipantau dan

dikendalikan pelaksanaannya, diharapkan apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan, dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5559 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, urusan pemerintahan umum terdapat pada bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan program sebagai berikut:

- a. 8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- b. 8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
- c. 8.01.04 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. 8.01.05 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
- e. 8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Dari sisi penyerapan anggaran, serapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 sangat baik, yaitu sebesar Rp. 6.639.088.286,- atau sebesar 97,52% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp. 6.807.641.768,-. Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini berasal dari:

- a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 6.639.088.286,- yang terdiri dari :
  - 1). Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 2,082,744,547,- dari anggaran sebesar Rp 2,146,373,010,- atau terealisasi sebesar 97.04%
  - 2). Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 1,536,533,739,- dari anggaran sebesar Rp 1,641,324,000,- atau terealisasi sebesar 93.62%
  - 3). Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp 3,019,810,000,- dari anggaran sebesar Rp 3,019,944,758.00,- atau terealisasi sebesar 99.996%

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan disajikan pada tabel berikut :

Sedangkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)\***

**Kabupaten Balangan**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
			Target	Realisasi	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun berjalan '(2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		K	Rp
5	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja</b>	67,5	Nilai	0	0	63.49	%	'62,56	%	99	99	64.5	nilai	0	Nilai	0.00	57.66	
5	01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik</b>	100	%	0	0	100	%	100	%	-	98	100	%	75	%	75.00	62.68
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	13	dok	0	0	3	dok	3	dok	100	99	2	dok	0	dok	0.00	69.1
5	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	laporan	0	0	2	dok	2	dok	-	-	2	dok	2	dok	100.00	47.77
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</b>	100	%	0	0	100	%	100	%	100	97	100	%	50	%	50.00	58,37
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100	%	0	0	100	%	100	%	100	97	100	%	50	%	50.00	58,78
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan keuangan akhir tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	100	%	0	0	100	%	100	%	100	99	100	%	100	%	100.00	100,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase laporan keuangan Semesteran (laporan)	100	laporan	0	0	100	%	100	laporan	100	82	100	%	50	%	50.00	30,43

			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100	%	0	0	100	%	100	%	100	97	100	%	100	%	100.00	96,63
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Beserta Perlengkapannya (stell)	178	stell	0	0	17	stell	17	stell	100	100	17	stell	17	stell	100.00	96,13
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51	op	0	0	10	op	10	op	100	97	2	org	2	org	100.00	96,69
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	100	%	0	0	100	%	100	%	100	100	100	%	50	%	50.00	62,35
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72	bulan	0	0	12	Bulan	12	bulan	100	100	12	bulan	6	bulan	50.00	46,59
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah komputer dan perlengkapan komputer yang diadakan, Jumlah Perlengkapan kantor yang diadakan (paket)	10	paket	0	0	1	Paket	1	paket	100	100	1	paket	0	paket	0.00	1,35
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk pegawai kesbangpol Kab. Balangan (bulan)	72	bulan	0	0	12	Bulan	12	bulan	100	100	12	bulan	6	bulan	50.00	32,27
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72	bulan	0	0	12	Bulan	12	bulan	100	100	12	bulan	6	bulan	50.00	27,45
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	%	0	0	100	%	100	%	100	100	100	%	60	%	60.00	74,84
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diadakan</b>	100	%	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang diadakan (buah)	4	buah	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	72	Bulan	0	0	12	Bulan	12	bulan	100	85	12	bulan	6	bulan	50.00	41,90	
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan jasa surat menyurat (bulan)	72	bulan	0	0	12	Bulan	12	bulan	100	70	12	bulan	6	bulan	50.00	40,69	
				Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air & listrik	Jumlah waktu terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	bulan	0	0	12	Bulan	12	bulan	100	91	12	bulan	6	bulan	50.00	37,92	
				Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah waktu terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	bulan	0	0	12	Bulan	12	bulan	100	100	12.00	bulan	6	bulan	50.00	50,00	
				Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	72	bulan	0	0	12	Bulan	12	bulan	100	91	12	bulan	6	bulan	50.00	48,52	
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	72	bulan	0	0	12	Bulan	12	bulan	100	92	12	bulan	6	bulan	50.00	48,95	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas dan Operasional Layak Fungsi	72	bulan	0	0	12	Bulan	12	bulan	100	89	12	bulan	6	bulan	50.00	52,62	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Gedung kantor layak fungsi	72	bulan	0	0	12	Bulan	12	bulan	100	97	12	bulan	6	bulan	50.00	42,28	
				<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat</b>	100	%	0	0	100	%	100	%	100	100	100	%	50	%	50.00	41,49	
				<i>Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</i>	Dokumen Perumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	6	dok	0	0	1	keg	1	keg	100	100	1	dok	0	dok	0.00	41,49	
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggalika dan Sejarah kebangsaan	Jumlah koordinasi gugus tugas GNRM yang dilaksanakan	6	keg	0	0	1	keg	1	keg	100	100	1	keg	0	keg	0.00	41,49	
					Jumlah fasilitasi pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan	11	keg	0	0	1	keg	1	keg	100	100	2	keg	0	keg	0.00		
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mengikuti Seminar Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan kebangsaan	5	keg	0	0	1	keg	1	keg	100	99	n/a	0	n/a	0	0.00	0,00	
				<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>Persentase Parpol yang aktif</b>	100	%	0	0	100	%	82	%	82.00	100	100.00	%	91.00	%	91.00	6,82	

				<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik</b>	Dokumen Perumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi , Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6	Dok	0	0	1	dok	1	dok	100	100	1	dok	0	dok	0.00	6,82
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Pendidikan Politik oleh parpol dan Jumlah pembinaan Etika Budaya Politik bagi Parpol	6	Keg	0	0	1	lap	1	lap	100	99	1	keg	0	keg	0.00	44,34
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah kegiatan Diskusi Politik dalam merumuskan kebijakan , Jumlah pembinaan/pengawasan bantuan dana parpol , Jumlah koordinasi pelaksanaan pemilu	4	Keg	0	-	1	lap	1	lap	100	99	1	keg	1	keg	100.00	23,53
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil verifikasi bantuan parpol	3	Lap	0	0	9	Lap	9	Lap	100	100	9	laporan	9	laporan	100.00	3,43
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Ormas yang aktif</b>	100	%	0	0	100	%	100	%	100	78	100	%	30	%	30.00	25,89
				<b>Perumusan kebijakan Teknis dan Pematapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	6	dok	0	0	1	dok	1	dok	100	78	1	dok	0	dok	0.00	25,89
				Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas asing di Daerah	Persentase ormas yang direkomendasikan untuk mendapatkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	100	ormas	0	0	100	ormas	100	ormas	100	77	100	%	100	%	100.00	34,55
				Pelaksanaan monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Ormas yang dibina melalui money	30	ormas	0	0	5	ormas	5	ormas	100	79	5	ormas	5	ormas	100.00	11,77
				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase Ormas Keagamaan yang Aktif</b>	100	%	0	0	100	%	100	%	100	97	100	%	50	%	50.00	46,28

				<b>Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	6	Org	0	0	1	dok	1	dok	100	97	1	dok	0	dok	0.00	46,28
				Pelaksanaan koordinasi di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah fasilitasi pelaksanaan P4GN (koordinasi dan atau pembinaan)	6	Keg	0	0	1	keg	1	keg	100	97	1	keg	0	keg	0.00	48,54
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan FKUB	6	Keg	0	0	1	keg	1	keg	100	97	1	keg	0	keg	0.00	39,50
				<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti</b>	100	%	0	0	100	%	100	%	100	95	100	%	100	%	100.00	28,21
				<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	6	dok	0	0	1	dok	0	dok	100	95	1	dok	0	dok	0.00	28,21
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah Daerah Rawan Potensi konflik yang terawasi ; Jumlah Fasilitasi FKDM	100	%	0	0	100	%	100	%	100	95	100	%	100	%	100.00	20,14
						24	keg	0	0	4	keg	4	kr	100			4	keg	0	keg	
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	24	Keg	0	0	4	keg	4	keg	100	90	4	keg	0	keg	0.00	26,73
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah koordinasi deteksi dini konflik social	24	keg	0	0	4	kegiatan	4	kegiatan	100	99	4	keg/rapat	1	keg/rapat	25.00	35,40
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Forkopimda	20	Keg	0	0	0	kali	0	kali	-	25						



Dari 6 (enam) Program yang dipangku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan yang terdiri dari 5 (lima) Program pada bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik ditambah 1(satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan 11 Kegiatan serta 30 Sub Kegiatan, hampir semua Program tercapai kinerjanya 100% dan hanya 1 Program yang belum tercapai 100% yaitu Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang capaian kinerjanya 81%

Adapun rincian capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TAHUN 2021

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI		
			KEUANGAN	% KINERJA	% KEUANGAN
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2,897,729,010</b>	<b>2,784,955,885</b>	<b>99%</b>	<b>96%</b>
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<b>66,496,000</b>	<b>65,428,000</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,908,000	50,240,000	100%	99%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,588,000	15,188,000	100%	97%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,198,554,610</b>	<b>2,125,628,147</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,146,373,010	2,082,744,547	100%	97%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	581,000	578,000	100%	97%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	51,600,600	42,305,600	100%	99%
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>111,580,000</b>	<b>108,680,000</b>	<b>100%</b>	<b>82%</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3,500,000	3,500,000	100%	97%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	108,080,000	105,180,000	100%	100%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>225,938,100</b>	<b>225,723,100</b>	<b>100%</b>	<b>97%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,955,000	6,941,000	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16,270,000	16,205,000	100%	100%

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,443,100	8,435,700	100%	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,400,000	2,400,000	100%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191,870,000	191,741,400	100%	100%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	-	-	-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>169,384,000</b>	<b>144,280,698</b>	<b>100%</b>	<b>85%</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	47,800,250	33,360,000	100%	70%
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air & listrik	65,412,000	59,422,898	100%	91%
	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	4,200,000	4,200,000	100%	100%
	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	51,971,750	47,297,800	100%	91%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>125,776,300</b>	<b>115,215,940</b>	<b>100%</b>	<b>92%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83,476,300	74,355,940	100%	89%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42,300,000	40,860,000	100%	97%
<b>2</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>2,429,574,758</b>	<b>2,424,428,600</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<i>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</i>	<b>2,429,574,758</b>	<b>2,424,428,600</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	2,423,724,758	2,418,652,600	100%	100%
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5,850,000	5,776,000	100%	99%
<b>3</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	<b>803,635,000</b>	<b>802,265,051</b>	<b>82%</b>	<b>100%</b>
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik</i>	<b>803,635,000</b>	<b>802,265,051</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	47,540,000	46,922,800	100%	99%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	23,645,000	23,504,000	100%	99%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	732,450,000	731,838,251	100%	100%
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT</b>	88,625,000	68,870,450	100%	78%
	<i>Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	88,625,000	68,870,450	100%	78%
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas asing di Daerah	44,855,000	34,475,450	100%	77%
	Pelaksanaan monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	43,770,000	34,395,000	100%	79%
5	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	98,615,000	95,903,700	100%	97%
	<i>Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	98,615,000	95,903,700	100%	97%
	Pelaksanaan koordinasi di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	60,750,000	59,160,800	100%	97%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	37,865,000	36,742,900	100%	97%
6	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	489,463,000	462,664,600	100%	95%
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	489,463,000	462,664,600	100%	95%

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	148,586,000	147,155,800	100%	99%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	120,056,000	108,334,800	100%	90%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	206,421,000	203,574,000	100%	99%
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	14,400,000	3,600,000	-	25%
<b>JUMLAH</b>	<b>6,807,641,768</b>	<b>6,639,088,286</b>	<b>96,76%</b>	<b>97,52%</b>

## 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan, mengacu pada RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 dengan Mewujudkan misi ke V Kepala Daerah yakni Mewujudkan Kehidupan Sosial, Budaya dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif. Dalam mewujudkan misi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan mempunyai sasaran yaitu : Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial dan Meningkatnya Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama dalam Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan . Dimana untuk mengukur tercapainya sasaran tersebut ada indikator kinerja yang harus dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :

1. Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan
2. Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk)
3. Persentase Ormas dan Parpol yang Aktif

Dalam rangka memenuhi target sasaran Renstra, Strategi yang diambil antara lain:

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Masyarakat

2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
4. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Adapun capaian sasaran dan indikator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Capaian Indikator Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial	Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan	100	100	100%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama dalam Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk)	45	42	93%	Sangat Tinggi
	Persentase Ormas dan Parpol yang Aktif	100	100	100%	Sangat Tinggi
	Persentase Parpol yang Aktif	100	81	81%	Tinggi
<b>Rata Rata Persentase Pencapaian Sasaran</b>				<b>93,50%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan telah tercapai dan berhasil dilaksanakan dengan capaian rata-rata  $\geq 93,50\%$  dengan katagori Sangat Tinggi

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial				
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Realisasi capaian kinerja dari indikator “Persentase Daerah Rawan Konflik” pada tahun 2021 sebesar 100% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena adanya indikator baru pada periode Renstra tahun 2021-2026.

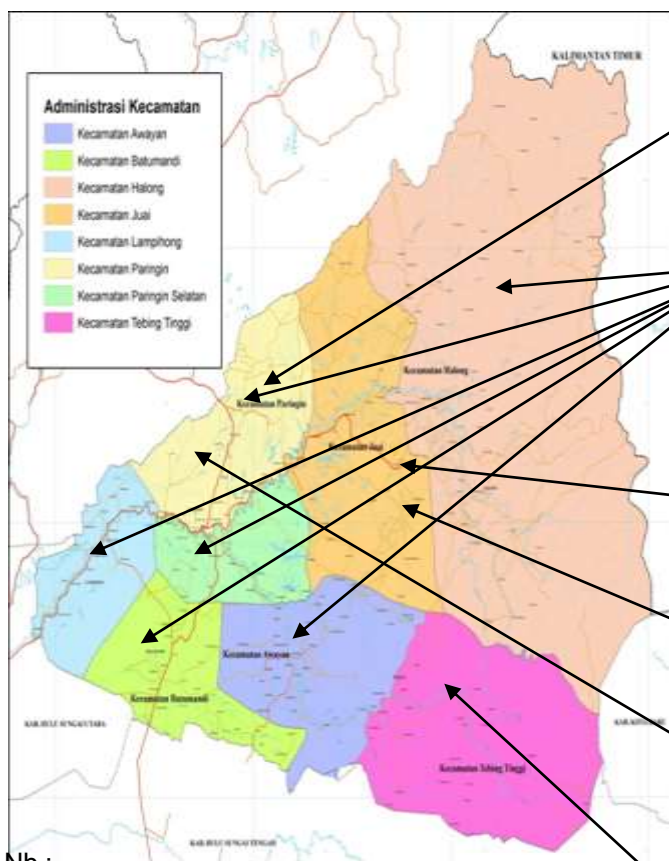
Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan di targetkan 100 %, dimana pada tahun 2021 ini terdapat kejadian yang berpotensi menjadi konflik sosial sebanyak 6 kasus di 8 Kecamatan, Jumlah Daerah Potensi Konflik yang dipetakan sepanjang tahun 2021 sebanyak 8 Daerah potensi konflik dan jumlah Daerah potensi konflik sendiri berjumlah 8 Kecamatan dan 6 Kasus potensi konflik sosial yang terindikasi dapat menyebabkan konflik sosial di masyarakat semuanya sudah ditangani dan tidak menimbulkan konflik.

Adapun capaian tersebut disupport oleh Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial didaerah melalui koordinasi tim terpadu penanganan konflik, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, Forkopimda dan Tim Puskomin, semua tim tersebut terdiri dari BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, BPN, Kemenag, BAIS dan BIN yang yang menghasilkan informasi-informasi terkait potensi konflik didaerah dan melakukan penyelesaian terhadap potensi konflik tersebut.

Dari hasil pemetaan terhadap Daerah Rawan Konflik sebanyak 8 (Delapan) Kecamatan , yang ditargetkan 8 Kecamatan , realisasi

keseluruhannya dapat dipetakan, sehingga capaian Indikator kinerja “Persentase Daerah Rawan Konflik” tercapai 100%, dengan terdapatnya 6 (enam ) potensi konflik yang terdiri dari potensi konflik politik dan potensi konflik sosial budaya seperti yang digambarkan oleh peta dibawah ini:

Hasil Pemetaan Wilayah Potensi Konflik  
Kabupaten Balangan Tahun 2021



Potensi Konflik Ekonomi

- a. Pasar Paringin, Antisipasi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok karena pandemi maupun bencana alam.

Potensi Konflik Politik

- a. Pemilihan Kepala Desa Serentak di wilayah Kabupaten Balangan sebanyak 17 Desa di 6 Kecamatan

Potensi Konflik Sosial Budaya

- a. Pemutusan Kontrak Kerja Oleh PT.SIS SERA terhadap karyawan yang notabene penduduk asli Kabupaten Balangan.
- b. Sengketa Lahan oleh kelompok masyarakat dengan pihak perusahaan.
- c. Aksi penyampaian sikap terkait jembatan dan jalan rusak akibat perusahaan oleh elemen mahasiswa dan kelompok masyarakat
- d. Adanya aduan masyarakat terkait dugaan ajaran menyimpang oleh majelis Al-Majhar Kecamatan Tebing tinggi.

Nb :

- Kecamatan Tebing Tinggi
- Kecamatan Lampihong
- Kecamatan Halong
- Kecamatan Paringin Selatan
- Kecamatan Aawayan
- Kecamatan Paringin
- Kecamatan Batumandi
- Kecamatan Juai

Sasaran 2 : Meningkatnya Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama dalam Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk)		45	42	93%
Persentase Ormas dan Parpol yang Aktif	Persentase Ormas yang Aktif	100%	100%	100%
	Persentase Parpol yang Aktif	100%	81%	81%
RATA- RATA CAPAIAN				91.33%

### 1. Rasio Tempat Ibadah

Realisasi capaian kinerja dari indikator “Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk) “pada tahun 2021 sebesar 93% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena adanya indikator baru pada periode Renstra tahun 2021-2026. Rasio tempat ibadah yang ditargetkan sebanyak 45 tempat ibadah sedangkan realisasinya sebanyak 42 tempat ibadah sampai ditahun 2021.

Capaian kinerja untuk indikator Rasio Tempat Ibadah (per 10.000 penduduk) dengan realisasi sebesar 42 Tempat Ibadah dalam 10.000 jumlah penduduk. Capaian ini tidak sesuai target sebesar 45 tempat ibadah dalam 10.000 jumlah penduduk, hal ini terjadi antara lain karena :

- Jumlah penduduk menurut penganut agama selain Islam cukup rendah di Kabupaten Balangan yaitu 8.237 jiwa (6,23 %) dari jumlah penduduk Kabupaten Balangan sebesar 132.123 jiwa di Kabupaten Balangan sehingga ketika ingin mendirikan rumah ibadah sering kali terkendala dengan persyaratan administrasi yang harus dilengkapi seperti yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 Pasal 14 yaitu :
  1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.
  2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang



yang disahkan oleh lurah/kepala desa.

3. Rekomendasi tertulis kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota.
4. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/kota.

## **1. Persentase Ormas dan Parpol yang Aktif**

### **a. Persentase Ormas yang Aktif**

Capaian kinerja dari “Persentase Ormas yang Aktif “ sebesar 100% dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena adanya indikator baru pada periode Renstra tahun 2021-2026.

Adapun Ormas yang dimaksud dalam indikator ini adalah Ormas yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri ataupun Kementerian Hukum dan Ham. Ormas di kabupaten Balangan yang terdaftar ataupun diakui oleh Kementerian adalah berjumlah sebanyak 18 Ormas.

### **b. Persentase Partai Politik yang Aktif**

Capaian kinerja dari “Persentase Parpol yang Aktif “ sebesar 81% dengan kategori capaian **Tinggi**. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena adanya indikator baru pada periode Renstra tahun 2021-2026.

Adapun Parpol yang dimaksud dalam indikator ini adalah Partai Politik yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan yang berjumlah sebanyak 21 (dua puluh satu) Parpol sedangkan parpol yang dikategorikan aktif berjumlah 17 Parpol.

Partai Politik yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan berjumlah 21 Parpol, terdiri dari 17 Parpol berstatus aktif, dan 4 Parpol berstatus tidak aktif. Berstatus tidak aktif dikarenakan tidak ada aktifitas yang dilakukan oleh parpol. Dari formulasi diatas dapat diketahui capaian kinerja Indikator Persentase Parpol yang aktif sebesar 81% ,

Untuk pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel T-C.30.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Balangan

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk)	-	-	45	47	50	53	55	60	42	47	
3	Persentase Ormas dan Parpol yang Aktif	% Ormas	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		% Parpol			100%	100%	100%	100%	100%	100%	81%	100%

### 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi yang selalu berkaitan dengan kondisi ketentraman sosial, politik, organisasi kemasyarakatan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan telah melaksanakan koordinasi penanganan konflik sosial, pengumpulan data dan informasi terkait daerah rawan potensi konflik sosial juga melaksanakan pengawasan terhadap daerah rawan potensi konflik sosial atau daerah berpotensi konflik, sosialisasi-sosialisasi wawasan kebangsaan, pelayanan pendaftaran ormas, pelayanan rekomendasi surat keterangan penelitian, pembinaan Organisasi Kemasyarakatan serta penyuluhan tentang pendidikan politik dan etika serta budaya politik bagi parpol dan masyarakat.

Secara garis besar Permasalahan dan hambatan yang dihadapi :

1. Kekhawatiran masyarakat akan keamanan diri dan keluarganya apabila menyampaikan informasi terkait permasalahan yang dapat menimbulkan potensi rawan konflik.

2. Minimnya pemahaman terkait nilai-nilai Pancasila, ancaman radikalisme dan komunisme, maupun penolakan terhadap Pancasila terhadap ideologi negara perlu ditindaklanjuti dengan upaya yang serius dan strategis melalui pembumih nilai-nilai Pancasila
3. Melemahnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya akibat pesatnya pertumbuhan perekonomian dan industri menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat dan memicu terjadinya potensi konflik sosial, terjadi perubahan sosial dalam masyarakat yang mengesampingkan toleransi dan gotong royong sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dalam mengembangkan usaha mendukung ekonomi mereka dan Persoalan pembangunan rumah ibadah yang memicu bentrokan antar pihak di daerah serta budaya asli Indonesia semakin luntur disebabkan maraknya budaya asing yang masuk ke Indonesia.
4. Urgensi Peningkatan kewaspadaan nasional dan daerah dianggap perlu terhadap permasalahan yang sensitif dan prinsip yang dapat mengganggu stabilitas nasional di daerah, di antaranya yang bersifat ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dapat dilakukan langkah langkah preventif melalui cegah dini dan deteksi dini, belum lagi potensi timbulnya konflik sosial di tengah masyarakat.
5. Rendahnya Pemahaman, Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
6. Masih kurangnya sarana prasarana yang mendukung operasional kegiatan.
7. Kurangnya dukungan anggaran dalam kegiatan sehingga sosialisasi-sosialisasi serta pelaksanaan pendidikan politik maupun Pembinaan Ormas belum dapat terlaksana secara maksimal.
8. Belum adanya identifikasi terhadap organisasi kemasyarakatan
9. Belum maksimalnya pelayanan rekomendasi Surat Keterangan Penelitian dan pendaftaran organisasi kemasyarakatan
10. Indikasi berita HOAX ditengah masyarakat
11. Kurangnya pembinaan terhadap Lembaga Adat terkait Administrasi , Dokumentasi dan lain lain
12. Belum adanya pengakuan kelembagaan resmi terkait status kelembagaan adat.

## **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023, merupakan tahun awal RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang disusun dan ditetapkan setelah pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih . RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana Kerja SKPD Tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Secara keseluruhan, Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023  
Kabupaten Balangan  
Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>65,20</b>	<b>3,882,539,265</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>65,20</b>	<b>3,882,539,265</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>102,501,900</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>102,501,900</b>
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	61,690,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	61,690,000
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dok	8,933,200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dok	8,933,200
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dok	3,384,600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dok	3,384,600
04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok	28,494,100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok	28,494,100

<b>2</b>	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>2,815,606,065</b>	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>2,815,606,065</b>
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang	2,774,122,465	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang	2,774,122,465
02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,739,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,739,500
03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	39,744,100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	39,744,100
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>61,724,700</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>61,724,700</b>
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Balangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	34,524,700	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Balangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	34,524,700
02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	27,200,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	27,200,000
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>527,283,200</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>527,283,200</b>
01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kab. Balangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,368,600	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kab. Balangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,368,600

02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	205,828,200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	205,828,200
03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Balangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,739,400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Balangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,739,400
04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3,057,600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3,057,600
05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262 Laporan	300,289,400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262 Laporan	300,289,400
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>212,871,100</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>212,871,100</b>
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	56,060,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	56,060,000
02	Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber daya air dan Listrik	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80,400,000	Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber daya air dan Listrik	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80,400,000
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10,116,500	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10,116,500
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	66,294,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	66,294,600
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>162,552,300</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>162,552,300</b>
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	119,872,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	119,872,500

02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Balangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	42,679,800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Balangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	42,679,800
2	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>133,095,600</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>133,095,600</b>
1	<i>Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</i>	<i>Kab. Balangan</i>	<i>Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>100%</i>	<i>133,095,600</i>	<i>Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</i>	<i>Kab. Balangan</i>	<i>Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>100%</i>	<i>133,095,600</i>
01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	53 Orang (unsur)	81,616,800	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	53 Orang (unsur)	81,616,800
02	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	51,478,800	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	51,478,800
3	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</b>	<b>100%</b>	<b>1,789,845,300</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</b>	<b>100%</b>	<b>1,789,845,300</b>



1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik</i>	Kab. Balangan	<i>Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	100%	1,789,845,300	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik</i>	Kab. Balangan	<i>Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	100%	1,789,845,300
01	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2664 Orang	317,532,600	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2664 Orang	317,532,600
02	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	214 Orang	656,087,800	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	214 Orang	656,087,800

03	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9 Laporan	816,224,900	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9 Laporan	816,224,900
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>Persentase Ormas yang aktif</b>	<b>100%</b>	358,507,100	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>Persentase Ormas yang aktif</b>	<b>100%</b>	358,507,100
1	<i>Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	Kab. Balangan	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	358,507,100	<i>Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	Kab. Balangan	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	358,507,100
01	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas asing di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	468 orang	165,999,600	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas asing di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	468 orang	165,999,600
02	Pelaksanaan monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 Laporan	192,507,500	Pelaksanaan monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 Laporan	192,507,500
5	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>Persentase Ormas Keagamaan yang Aktif</b>	<b>100%</b>	123,836,400	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>Persentase Ormas Keagamaan yang Aktif</b>	<b>100%</b>	123,836,400

1	<i>Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	Kab. Balangan	<i>Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	100%	123,836,400	<i>Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	Kab. Balangan	<i>Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	100%	123,836,400
01	Pelaksanaan koordinasi di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	35 Orang (unsur)	99,939,200	Pelaksanaan koordinasi di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	35 Orang (unsur)	99,939,200
02	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	23,897,200	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	23,897,200
6	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Kab. Balangan	Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	100%	684,451,000	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Kab. Balangan	Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	100%	684,451,000
1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	Kab. Balangan	<i>Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	1 Dokumen	684,451,000	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	Kab. Balangan	<i>Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	1 Dokumen	684,451,000

01	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	5 dokumen	59,033,300	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	5 dokumen	59,033,300
02	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	32 Orang (unsur)	308,606,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	32 Orang (unsur)	308,606,000
03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 orang (unsur)	104,372,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 orang (unsur)	104,372,000

04	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	66,252,800	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	66,252,800
05	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	146,186,900	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	146,186,900
					<b>6,972,274,665</b>					<b>6,972,274,665</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja ini dapat bersumber dari usulan SKPD, dari masukan pihak Legislatif (DPRD) maupun aspirasi dari masyarakat dimana usulan-usulan Program dan Kegiatan tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Adapun usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan pada tahun 2023 ini belum ada usulan terkait penganggaran.

Tabel T-C.32.  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

Jika ada usulan, apabila memungkinkan akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan dana yang ada dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan pemerintahan daerah, rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023, secara umum berpedoman pada sasaran dan tujuan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran ini juga mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam pelaksanaannya desentralisasi penataan daerah ditujukan pada upaya untuk :

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah;
- f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Rumusan tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yaitu:
  1. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Perdesaan dan Perkotaan
  2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
  3. Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
  4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
  5. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif
  6. Meningkatnya nilai Indeks Desa membangun

Sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2023 terkait dengan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah bertahannya angka konflik sosial yang bernuansa SARA untuk mewujudkan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan Terjaganya kehidupan sosial yang kondusif dengan Indikator tujuan Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2023 merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Balangan. Oleh karena itu, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Kalimantan Selatan 2005–2025, RPJM Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan 2023; RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023.

### **3.1.TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN SINERGITAS KEBIJAKAN DAERAH.**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan undangundang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Penyusunan RKP Tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan.

Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari

pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dasar antara lain : air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan 2023 yaitu “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan

Perekonomian Berkelanjutan”. Berdasarkan tema RKPD tersebut ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Sain
2. Optimalisasi Sektor Industri, UMKM, Pertanian Dan Pariwisata
3. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik
5. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana
6. Mewujudkan Kalsel Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara Dan Sebagai Pendukung Food Estate

Berdasarkan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus yang salah satunya Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak pada tahun 2024 menganggarkan dukungan pendanaan kegiatan pilkada serentak sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran yang memadai tahun anggaran 2022-2025 pada organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri. Adapun program dan kegiatan yang dimaksud antara lain:

- 1) Pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat;

- 2) Pembinaan forum kerukunan umat beragama;
- 3) Gerakan kemitraan bersama organisasi kemasyarakatan sipil dan perguruan tinggi mensukseskan pemilu serentak tahun 2024;
- 4) Pembinaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan (FORKOPIMCAM);
- 5) Pembumian nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat mendukung pemilu serentak dan pilkada serentak Tahun 2024;
- 6) Forum komunikasi sosial politik dalam rangka sukses pemilu serentak 2024;
- 7) Pembentukan dan operasionalisasi tim pemantauan, dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan dan tahapan pemilu serentak 2024;
- 8) Penguatan iklan layanan pendidikan politik; dan
- 9) Pembinaan karya seni dan budaya sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mendukung pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Perencanaan pembangunan daerah kabupaten tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Balangan, RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021, permasalahan di Kabupaten Balangan, serta isu-isu strategis, kerangka ekonomi daerah dan pendanaan maka tema pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2023 adalah “ Peningkatan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Potensi Daerah Untuk Memajukan Perekonomian Berkelanjutan “.

Berdasarkan tema tersebut, maka dibuat 6 (enam) Prioritas dan Sasaran Pembangunan pada Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah
2. Pemulihan Ekonomi dalam penanganan dampak pandemi corona virus disease 2019 dan Transformasi Struktural Dalam Perekonomian
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
5. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan
6. Peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan

Hal hal mendasar yang menjadi kebijakan dalam perencanaan pembangunan tahun 2023 mendatang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata, serta ekonomi kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan sesuai dengan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung Misi ke -5 (Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif)

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan visi

dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

a. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan strategik ini maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan adalah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET
1	Terwujudnya Kerukunan dan Toleransi dalam Masyarakat	Angka Konflik Sosial Bernuansa Sara	0

b. Sasaran

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas.

Adapun yang menjadi sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Tahun 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
1	Terwujudnya Kerukunan dan Toleransi dalam Masyarakat	Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial	Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan	100 %
		Meningkatnya Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama dalam Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk)	50
			Persentase Ormas dan Parpol yng Aktif	100%

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program tersebut, ada beberapa kriteria yang ditetapkan antara lain:

1. Memperhatikan tugas pokok dari masing-masing bidang
2. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Balangan
3. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang



4. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah serta pencapaian IKU Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk Tahun 2023 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2023 mencakup 6 Program terdiri dari 11 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan Rencana anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan program kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 6.972.274.665 (Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yang berasal dari APBD.

Rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kabupaten Balangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>8</b> <b>0</b> <b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	<i>Kesbangpol</i>	<i>65,20</i>	<i>3,882,539,265</i>	<i>APBD Kab. Balangan</i>		<i>65,90</i>	<i>4,260,879,472</i>
8 0 1 0 1 # #	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik</i>	<i>Kesbangpol</i>	<i>100%</i>	<i>102,501,900</i>	<i>APBD Kab. Balangan</i>		<i>100%</i>	<i>112,752,060</i>
8 0 1 0 1 # 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesbangpol	2 dok	61,690,000	APBD Kab. Balangan		2 dok	67,859,000
8 0 1 0 1 # 0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kesbangpol	2 dok	8,933,200	APBD Kab. Balangan		2 dok	9,826,500
8 0 1 0 1 # 0 4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kesbangpol	2 dok	3,384,600	APBD Kab. Balangan		2 dok	3,723,060
8 0 1 0 1 # 0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kesbangpol	2 dok	28,494,100	APBD Kab. Balangan		2 dok	31,343,500
<b>8</b> <b>0</b> <b>1</b> <b>0</b> <b>1</b> <b>#</b> <b>#</b>	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</b>	<b><i>Kesbangpol</i></b>	<b><i>100%</i></b>	<b><i>2,815,606,065</i></b>	<b><i>APBD Kab. Balangan</i></b>		<b><i>100%</i></b>	<b><i>3,093,294,662</i></b>
8 0 1 0 1 # 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kesbangpol	17 orang	2,774,122,465			17 orang	3,051,534,712
8 0 1 0 1 # 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kesbangpol	1 Laporan	1,739,500	APBD Kab. Balangan		1 Laporan	1,913,450

8	0	0	#	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kesbangpol	18 Laporan	39,744,100	APBD Kab. Balangan	18 Laporan	39,846,500
8	0	0	#		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kesbangpol</b>	<b>100%</b>	<b>61,724,700</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>	<b>1</b>	<b>122,897,170</b>
8	0	0	#	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kesbangpol	2 Paket	34,524,700	APBD Kab. Balangan	2 Paket	37,977,170
8	0	0	#	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kesbangpol	10 Orang	27,200,000	APBD Kab. Balangan	10 Orang	84,920,000
8	0	0	#		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kesbangpol</b>	<b>100%</b>	<b>527,283,200</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>	<b>100%</b>	<b>609,933,680</b>
8	0	0	#	0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kesbangpol	1 Paket	7,368,600	APBD Kab. Balangan	1 Paket	8,107,660
8	0	0	#	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kesbangpol	1 Paket	205,828,200	APBD Kab. Balangan	1 Paket	226,411,020
8	0	0	#	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kesbangpol	1 Paket	10,739,400	APBD Kab. Balangan	1 Paket	11,813,300
8	0	0	#	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kesbangpol	1 Dokumen	3,057,600	APBD Kab. Balangan	1 Dokumen	3,363,400
8	0	0	#	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kesbangpol	262 Laporan	300,289,400	APBD Kab. Balangan	1 Laporan	360,238,300
8	0	0	#		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diadakan</b>	<b>Kesbangpol</b>		<b>-</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>		
8	0	0	#	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kesbangpol		-	APBD Kab. Balangan		
8	0	0	#		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kesbangpol</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>212,871,100</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>153,358,150</b>
8	0	0	#	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kesbangpol	12 Laporan	56,060,000	APBD Kab. Balangan	1 Laporan	52,470,000
8	0	0	#	0	Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kesbangpol	12 Laporan	80,400,000	APBD Kab. Balangan	1 Laporan	89,760,000

8	0	0	#	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kesbangpol	12 Laporan	10,116,500	APBD Kab. Balangan		1 Laporan	11,128,150
8	0	0	#	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kesbangpol	12 Laporan	66,294,600	APBD Kab. Balangan		1 Laporan	65.963.700
8	0	0	#		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kesbangpol</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>162,552,300</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>168,643,750</b>
8	0	0	#	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kesbangpol	24 Unit	119,872,500	APBD Kab. Balangan		24 Unit	127,987,750
8	0	0	#	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kesbangpol	2 Unit	42,679,800	APBD Kab. Balangan		2 Unit	40,656,000
8	0	0			<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat</b>	<b>Kesbangpol</b>	<b>100%</b>	<b>133,095,600</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>		<b>100%</b>	<b>169,678,500</b>
8	0	0	#		<b>Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</b>	<b>Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Kesbangpol</b>	<b>100%</b>	<b>133,095,600</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>		<b>100%</b>	<b>169,678,500</b>
8	0	0	#	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	53 Orang (unsur)	81,616,800	APBD Kab. Balangan		16 Orang (unsur)	87,358,500
8	0	0	#	0	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	1 Laporan	51,478,800	APBD Kab. Balangan		1 Laporan	82,320,000
8	0	0			<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</b>	<b>Kesbangpol</b>	<b>100%</b>	<b>1,789,845,300</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>		<b>100%</b>	<b>60,932,003,550</b>

8	0	0	2		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik</b>	<b>Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</b>	<b>Kesbangpol</b>	<b>100%</b>	<b>1,789,845,300</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>	<b>100%</b>	<b>60,932,003,550</b>
8	0	0	2	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	2664 Orang	317,532,600	APBD Kab. Balangan	100 Orang	349,285,900
8	0	0	2	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	214 Orang	656,087,800	APBD Kab. Balangan	20 Orang	59,687,774,250
8	0	0	2	0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	9 Laporan	816,224,900	APBD Kab. Balangan	9 Laporan	894,943,400
8	0	0			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Ormas yang aktif</b>	<b>Kesbangpol</b>	<b>100%</b>	<b>358,507,100</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>	<b>100%</b>	<b>391,453,850</b>
8	0	0	2		<b>Perumusan kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<b>Kesbangpol</b>	<b>100%</b>	<b>358,507,100</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>	<b>100%</b>	<b>391,453,850</b>

8	0	0	2	0	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	468 orang	165,999,600	APBD Kab. Balangan	60 Orang (unsur)	182,599,600
8	0	0	2	0	Pelaksanaan monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	3 Laporan	192,507,500	APBD Kab. Balangan	1 Laporan	208,854,250
8	0	0			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase Ormas Keagamaan yang Aktif</b>	<i>Kesbangpol</i>	<b>100%</b>	<b>123,836,400</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>	<b>100%</b>	<b>132,348,000</b>
8	0	0	2		<i>Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Kesbangpol</i>	<b>100%</b>	<b>123,836,400</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>	<b>100%</b>	<b>132,348,000</b>
8	0	0	2	0	Pelaksanaan koordinasi di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	35 Orang (unsur)	99,939,200	APBD Kab. Balangan	55 Orang (unsur)	106,061,100
3	2	0	2	0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	1 Laporan	23,897,200	APBD Kab. Balangan	1 Laporan	26,286,900
8	0	0			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti</b>	<i>Kesbangpol</i>	<b>100%</b>	<b>684,451,000</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>	<b>100%</b>	<b>792,486,450</b>
8	0	0	2		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Kesbangpol</i>	<b>1 Dokumen</b>	<b>684,451,000</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>792,486,450</b>

8	0	0	2	0	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		5 dokumen	59,033,300		6 dokumen	84,927,150
8	0	0	2	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	32 Orang (unsur)	308,606,000	APBD Kab. Balangan	32 Orang (unsur)	337,046,600
8	0	0	2	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	200 orang (unsur)	104,372,000	APBD Kab. Balangan	200 orang (unsur)	139,733,000
8	0	0	2	0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	4 Laporan	66,252,800	APBD Kab. Balangan	6 Laporan	69,974,100
8	0	0	2	0	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	146,186,900			160,805,600
									6,972,274,665			66,678,849,822

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahun 2023 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi program kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Renja Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Rencana kerja dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2023, Prioritas Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 benar-benar yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang, satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel T-C.33

## Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

## Kabupaten Balangan

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8 0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	<i>Kab. Balangan</i>	<i>65,20</i>	<i>3,882,539,265</i>	<i>APBD Kab. Balangan</i>		<i>65,90</i>	<i>4,260,879,472</i>
8 0 1	0 # Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik</i>	<i>Kab. Balangan</i>	<i>100%</i>	<i>102,501,900</i>	<i>APBD Kab. Balangan</i>		<i>100%</i>	<i>112,752,060</i>
8 0 1	0 # 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	2 dok	61,690,000	APBD Kab. Balangan		2 dok	67,859,000
8 0 1	0 # 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Balangan	2 dok	8,933,200	APBD Kab. Balangan		2 dok	9,826,500
8 0 1	0 # 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Balangan	2 dok	3,384,600	APBD Kab. Balangan		2 dok	3,723,060
8 0 1	0 # 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	2 dok	28,494,100	APBD Kab. Balangan		2 dok	31,343,500
8 0 1	0 # <i>Administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<i>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</i>	<i>Kab. Balangan</i>	<i>100%</i>	<i>2,815,606,065</i>	<i>APBD Kab. Balangan</i>		<i>100%</i>	<i>3,093,294,662</i>
8 0 1	0 # 0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	17 orang	2,774,122,465			17 orang	3,051,534,712
8 0 1	0 # 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Balangan	1 Laporan	1,739,500	APBD Kab. Balangan		1 Laporan	1,913,450

8	0	0	#	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Balangan	18 Laporan	39,744,100	APBD Kab. Balangan		18 Laporan	39,846,500
8	0	0	#		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>100%</b>	<b>61,724,700</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>		<b>1</b>	<b>122,897,170</b>
8	0	0	#	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Balangan	2 Paket	34,524,700	APBD Kab. Balangan		2 Paket	37,977,170
8	0	0	#	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kesbangpol	10 Orang	27,200,000	APBD Kab. Balangan		10 Orang	84,920,000
8	0	0	#		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>100%</b>	<b>527,283,200</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>		<b>100%</b>	<b>609,933,680</b>
8	0	0	#	0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	1 Paket	7,368,600	APBD Kab. Balangan		1 Paket	8,107,660
8	0	0	#	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	1 Paket	205,828,200	APBD Kab. Balangan		1 Paket	226,411,020
8	0	0	#	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Balangan	1 Paket	10,739,400	APBD Kab. Balangan		1 Paket	11,813,300
8	0	0	#	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Balangan	1 Dokumen	3,057,600	APBD Kab. Balangan		1 Dokumen	3,363,400
8	0	0	#	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	262 Laporan	300,289,400	APBD Kab. Balangan		262 Laporan	360,238,300
8	0	0	#		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>212,871,100</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>153,358,150</b>
8	0	0	#	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Balangan	12 Laporan	56,060,000	APBD Kab. Balangan		12 Laporan	52,470,000
8	0	0	#	0	Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Balangan	12 Laporan	80,400,000	APBD Kab. Balangan		12 Laporan	89,760,000
8	0	0	#	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	12 Laporan	10,116,500	APBD Kab. Balangan		12 Laporan	11,128,150

8	0	0	#	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	12 Laporan	66,294,600	APBD Kab. Balangan		12 Laporan	65.963.700
8	0	0	#		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>162,552,300</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>168,643,750</b>
8	0	0	#	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Balangan	24 Unit	119,872,500	APBD Kab. Balangan		24 Unit	127,987,750
8	0	0	#	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Balangan	2 Unit	42,679,800	APBD Kab. Balangan		2 Unit	40,656,000
8	0	0			<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>100%</b>	<b>133,095,600</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>		<b>100%</b>	<b>169,678,500</b>
8	0	0	#		<b>Perumusan kebijakan teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</b>	<b>Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>100%</b>	<b>133,095,600</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>		<b>100%</b>	<b>169,678,500</b>
8	0	0	#	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Balangan	53 Orang (unsur)	81,616,800	APBD Kab. Balangan		53 Orang (unsur)	87,358,500
8	0	0	#	0	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Balangan	1 Laporan	51,478,800	APBD Kab. Balangan		1 Laporan	82,320,000
8	0	0			<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>100%</b>	<b>1,789,845,300</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>		<b>100%</b>	<b>60,932,003,550</b>

8	0	0	2		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik</b>	<b>Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</b>	<b>Kab Balangan</b>	<b>100%</b>	<b>1,789,845,300</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>	<b>100%</b>	<b>60,932,003,550</b>
8	0	0	2	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Balangan	2664 Orang	317,532,600	APBD Kab. Balangan	2664 Orang	349,285,900
8	0	0	2	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Balangan	214 Orang	656,087,800	APBD Kab. Balangan	214Orang	59,687,774,250
8	0	0	2	0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Balangan	9 Laporan	816,224,900	APBD Kab. Balangan	9 Laporan	894,943,400
8	0	0			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Ormas yang aktif</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>100%</b>	<b>358,507,100</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>	<b>100%</b>	<b>391,453,850</b>
8	0	0	2		<b>Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi</b>	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan	Kab. Balangan	<b>100%</b>	358,507,100	<b>APBD Kab. Balangan</b>	<b>100%</b>	391,453,850

1				<b>Kemasyarakatan</b>	Organisasi Kemasyarakatan							
8	0	0	2	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Balangan	468 orang	165,999,600	APBD Kab. Balangan		468 orang	182,599,600
8	0	0	2	Pelaksanaan monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Balangan	3 Laporan	192,507,500	APBD Kab. Balangan		3 Laporan	208,854,250
8	0	0		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase Ormas Keagamaan yang Aktif</b>	Kab. Balangan	<b>100%</b>	<b>123,836,400</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>		<b>100%</b>	<b>132,348,000</b>
8	0	0	2	<i>Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	Kab. Balangan	<b>100%</b>	<b>123,836,400</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>		<b>100%</b>	<b>132,348,000</b>
8	0	0	2	Pelaksanaan koordinasi di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Balangan	35 Orang (unsur)	99,939,200	APBD Kab. Balangan		35 Orang (unsur)	106,061,100
3	2	0	2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Balangan	1 Laporan	23,897,200	APBD Kab. Balangan		1 Laporan	26,286,900
8	0	0		<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti</b>	Kab. Balangan	<b>100%</b>	<b>684,451,000</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>		<b>100%</b>	<b>792,486,450</b>
8	0	0	2	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	Kab. Balangan	<b>1 Dokumen</b>	<b>684,451,000</b>	<b>APBD Kab. Balangan</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>792,486,450</b>

8	0	0	2	0	0	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kab. Balangan	5 dokumen	59,033,300			5 dokumen	84,927,150
8	0	0	2	0	0	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Balangan	32 Orang (unsur)	308,606,000	APBD Kab. Balangan		32 Orang (unsur)	337,046,600
8	0	0	2	0	0	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Balangan	200 orang (unsur)	104,372,000	APBD Kab. Balangan		200 orang (unsur)	139,733,000
8	0	0	2	0	0	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Balangan	4 Laporan	66,252,800	APBD Kab. Balangan		4 Laporan	69,974,100
8	0	0	2	0	0	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	1 Dokumen	146,186,900	APBD Kab. Balangan		1 Dokumen	160,805,600
											<b>6,972,274,665</b>			<b>66,678,849,822</b>	

## BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023 ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Balangan secara keseluruhan. Rincian daftar program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 diupayakan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta tepat waktu.

Rencana Kerja ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang sesuai dengan tugas, pokok, fungsi masing-masing, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negatif dalam operasional organisasi.

Selain **input** yang baik, hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah kualitas pelaksanaan kegiatan. **input** dan **proses** akan memberikan **benefit** dan **impact** kepada **output** maupun **outcome**, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu semua pihak terkait, khususnya jajaran aparat yang ada didalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu mencermati berbagai rambu dan petunjuk di dalam melaksanakan tugas serta mengemban tanggung jawabnya. Pelaksanaan tugas harus fokus pada upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang secara tidak langsung juga akan berdampak pada pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yaitu Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju dan Sejahtera.

Parangin, 15 Juli 2022  
Plt. Kepala Badan  
Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Balangan



**RUDIANSYAH SOFYAN, S. Hut, ME**  
Pembina Utama Muda/ IVc  
NIP. 19690324 199703 1 001

